

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011-2012**

NASKAH PUBLIKASI



DI SUSUN OLEH :

ANIK LISTIANA

B 200 100 008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul :

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2012.

Yang ditulis oleh:

ANIK LISTIANA

B200100008

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima:

Surakarta, 23 Desember 2014

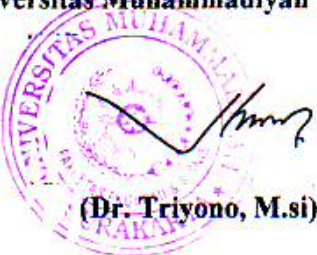
Pembimbing



(Drs. Atwal Arifin, M.si, Ak.CA)

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



(Dr. Triyono, M.si)

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2012

ANIK LISTIANA

B 200 100008

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : analisti54@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan kabupaten/kota yang mengeluarkan realisasi APBD selama periode 2011-2012 dengan format SAP yang dipublikasikan pada situs www.djpk.depkeu.go.id dan data yang disajikan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan atau setiap kabupaten/Kota dengan lengkap mempublikasikan antara tahun 2011-2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai signifikan $0,044 < 0,05$. Kedua, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai signifikan $0,057 > 0,05$. Ketiga, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh nilai 57,60% variasi variabel belanja modal dapat dipengaruhi oleh PDRB, PAD dan DAU sedangkan sisanya yaitu 42,40% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model yang terkait.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktifitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Yang berarti dalam pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yulia, 2009).

Dalam proses penyusunan anggaran terjadi hubungan keagenan antar eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Kedudukan eksekutif yang lebih rendah dari legislatif membuat eksekutif sulit menolak usulan legislatif dalam mengalokasikan sumber daya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, sehingga

menyebabkan outcome anggaran dalam bentuk layanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik (Setyorini, 2012).

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-seharinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitasnya yang akan semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha didaerah tersebut. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkat partisipasi publik dalam pembangunan (Maryati dan Ulfi, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2012”**.

2. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan, penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi atau tugas pembaruan tidak dicatat dalam APBD (budidaya.blogspot.com). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam satu masa anggaran (Uhise, 2013).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Adi (2007) dalam Sularso (2011) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya, suatu daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri, karena salah satu indikator untuk melihat kadar otonomi suatu daerah tertentu pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Besar kecilnya PAD paling tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar otonomi daerah tersebut.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

PP No. 55/2005 tentang dana perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

5. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2008). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data penelitian ini bersumber dari dokumen laporan reasasi APBN yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum(DAU), sedangkan data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) perkapita dari BPS tahun 2011-2012. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

D. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1) Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogrov-Smirnov	ρ -value	Keterangan
Unstandardized Residual	0,964	0,310	Sebaran data normal

Sumber: Data yang diolah, 2014.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov*

menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal.

2. Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
PDRB	0,322	3,106	Tidak terjadi multikolinieritas
PAD	0,320	3,128	Tidak terjadi multikolinieritas

DAU 0,966 1,035 Tidakterjadimultikolinearitas

Sumber: Hasil pengolahan data, 2014

Hasildi atasmenujukkannilainilai *VIF* tidakmelebihi 10, demikianjuganilai *tolerancetidaklebihdari* 1, sehinggadapatdikatakan model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Hteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t_{hitung}	Sig.	Keputusan
PDRB	0,952	0,344	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PAD	-0,489	0,627	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAU	-0,577	0,566	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa semua nilai t_{hitung} dari ketiga variabel dependen lebih kecil dari pada t_{tabel} atau nilai sign. lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1	.759 ^a	.576	.557	48695,312	1,982
---	-------------------	------	------	-----------	-------

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa nilai statistik d dari *Durbin-Watson* pada *level of significance* 5% yang terlihat pada bagian model summary angka $DW = 1,982$, hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi, karena nilai $DW = 1,526$ nilainya diantara -2 s/d $+2$.

2) Analisis Linear Berganda

Nilai konstanta belanja modal adalah 90802,777. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum meningkat, maka belanja modal meningkat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum menurun, maka belanja modal akan menurun. Nilai koefisien regresi produk domestik regional bruto (PDRB) adalah sebesar 0,005. Hal ini berarti semakin tinggi atau baik produk domestik regional bruto, maka akan meningkatkan belanja modal. Sebaliknya, apabila produk domestik regional bruto semakin rendah, maka semakin menurun belanja modal. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 0,237. Hal ini berarti semakin tinggi atau baik pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan belanja modal. Sebaliknya, apabila pendapatan asli daerah semakin rendah, maka semakin menurun belanja modal.

Nilai koefisien regresi dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar 0,093. Hal ini berarti semakin tinggi atau baik dana alokasi umum, maka akan meningkatkan belanja modal. Sebaliknya, apabila dana alokasi umum semakin rendah, maka semakin menurun belanja modal.

Dari hasil regresi berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + e$$

$$Y = 90802,777 + 0,005\text{PDRB} + 0,237\text{PAD} + 0,093\text{DAU}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011-2012.

3) Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal daerah di wilayah pemerintah Kabupaten maupun Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hasil uji-t dapat dilihat dalam tabel.

Nilai t_{hitung} dan Signifikansi

No.	Variabel Independen	t_{hitung}	ρ	t_{tabel}	Kesimpulan
1	PDRB	2,050	0,044	$\pm 2,021$	H ₁ diterima
2	PAD	1,941	0,057	$\pm 2,021$	H ₂ ditolak
3	DAU	5,482	0,000	$\pm 2,021$	H ₃ diterima

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel tersebut dapat diuraikan pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

a) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,050 yang nilainya lebih kecil dari ($t_{tabel} \pm 2,021$) dengan nilai probabilitas sebesar $0,044 < 0,05$ berarti berada pada daerah penolakan H_0 , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima kebenarannya.

b) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,941 yang nilainya lebih kecil dari ($t_{tabel} \pm 2,021$) dengan nilai probabilitas sebesar $0,057 > 0,05$ berarti berada pada daerah penerimaan H_0 , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_2 ditolak kebenarannya.

c) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,482 yang nilainya lebih besar dari ($t_{tabel} \pm 2,021$) dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ berarti berada pada daerah penolakan H_0 , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_3 diterima kebenarannya.

2. Uji F

Rekapitulasi Hasil Uji F

F_{hitung}	F_{tabel}	p-value	Keterangan
29,940	2,610	0,000	Goodness of fit

Berdasarkan data yang dihasilkandariperhitungandenganprogram SPSS tersebut, diperolehhasilbahwa F_{hitung} sebesar 29,940 dan $F_{tabel} \pm 2,610$. Apabila dibandingkandenganhasiluji F_{hitung} dengannilai F_{tabel} , makadapatdilihatbahwahasilujistatistikdaridistribusi F_{hitung} lebih besar dari F

tabelnyayaitu $29,940 > 2,610$ dengan p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian model yang menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal adalah *goodness of fit*.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui kontribusi seberapa besar pengaruh variabel independen (PDRB, PAD, dan DAU) secara bersama-sama terhadap nilai belanja modal dapat diketahui dengan menggunakan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-square*). Dari perhitungan statistik dapat dilihat bahwa *Adjusted R-square* adalah sebesar 0,576 atau 57,60%, artinya bahwa 57,60% variasi variabel belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten maupun kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, PAD, dan DAU, sedangkan sisanya yaitu 42,40% dijelaskan oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

2. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Mentayani dan Rusmanto (2013), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar karena kekayaan alamnya dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat

produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak DAU yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, begitu juga sebaliknya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yaitu H_1 yang berbunyi pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 2,050$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,021$ atau nilai probabilitas $0,044 < 0,05$.
2. Hipotesis kedua yaitu H_2 yang berbunyi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 1,941$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,021$ atau nilai probabilitas $0,057 > 0,05$.
3. Hipotesis ketiga yaitu H_3 yang berbunyi Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 5,382$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,021$ atau nilai probabilitas $0,000 < 0,05$.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel independennya tidak hanya variabel pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah periode tahun pengamatan yaitu tidak hanya periode tahun 2011-2012 saja.
3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian tidak hanya di satu provinsi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto, dan Yulia Yustikasari, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. SNA X
- Halim, Abdul. 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama: Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Maryati, Eni, dan Ulfi Endrawati. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Volume 5 Nomor 2. 68-84
- Mentayani, Ida, dan Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisalebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*. *Jurnal Infestasi* Volume 9 Nomor 2. 91-102
- Setyorini, Denok. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002-2010*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sularso, Havid. 2011, *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Akmenipa UPY, Vol 3, 2011.
- Peraturan Pemerintahan. 2005. *Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*
- Uhise, Stepvani. 2013. *Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal EMBA* Volume 1 Nomor 4. 1677-1686